

TAMAN PINTAR FAVORIT WISATAWAN KELUARGA

Pasar Beringharjo Dikunjungi 18.000 Orang Per Hari

YOGYA (KR) - Tingkat kunjungan di Kota Yogya masih cukup tinggi hingga jelang sepekan sejak lebaran. Salah satunya di Pasar Beringharjo yang dikunjungi sekitar 18.000 orang per hari. Begitu pula Taman Pintar yang menjadi tempat wisata favorit bagi wisatawan keluarga.

Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogya Gunawan Nugroho Utomo, menjelaskan lonjakan pengunjung di Pasar Beringharjo sebetulnya sudah dirasakan sejak sebelum lebaran. "Sebelum hari raya masyarakat fokus berbelanja bahan pokok seperti beras, gula, ayam, minyak dan lainnya. Sedangkan H-1 lebaran banyak pakaian atau busana muslim dicari," jelasnya, Kamis (27/4).

Dengan lonjakan pengunjung tersebut Gunawan berharap perekonomian pedagang juga ikut

terdongkrak. Apalagi selama dua tahun dilanda pandemi Covid-19, ekonomi sempat terseok karena sepiunya pengunjung akibat pembatasan kegiatan. Lokasi Pasar Beringharjo yang berada di pusat kota serta di kawasan Malioboro menjadi kekuatan tersendiri. Statusnya yang menyandang pasar tradisional kelas I juga bisa menjadi alternatif wisata belanja.

Gunawan mengatakan, jika sebelum lebaran pengunjung Pasar Beringharjo didominasi penduduk Kota Yogya namun kali ini 80 persen ialah wisatawan

dari luar daerah. Mereka sebagian besar berbelanja produk batik dan kerajinan untuk oleh-oleh kembali ke daerah asal.

"Kami prediksi pengunjung masih akan ramai sampai liburan sekolah atau hingga 1 Mei 2023. Wisatawan kamiimbau jangan malu bertanya kepada petugas jika mengalami kesulitan saat mencari jalan ataupun mencari lokasi berbelanja yang ada di Malioboro," katanya.

Sementara itu, Taman Pintar juga tak luput dari tingkat kunjungan wisatawan. Terutama wisatawan dari rombongan

keluarga. Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Budaya Kota Yogya Karmila, menjelaskan khusus libur lebaran ini pihaknya menambah loket tiket untuk mengurangi antrean.

"Kalau hari biasa hanya tiga loket, sekarang ada empat yang dibuka. Zona yang masih jadi favorit pengunjung itu Gedung Oval, karena berisi beragam peraga edukasi untuk anak-anak segala usia," ujarnya.

Selain itu, Planetarium dan Kampung Kerajinan juga menjadi zona yang paling disukai pengunjung. Kemudian pada Mei mendatang pihaknya juga akan meluncurkan zona terbaru di Gedung Oval, yaitu Sea Life bekerja sama dengan PT Citra



KR-Istimewa

Para pengunjung menjejali Pasar Beringharjo pada libur lebaran tahun ini.

Dimensi Arthali. Bahkan guna memfasilitasi pengunjung serta mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Yogya, Taman Pintar menggelar

bazaar makanan dari 25 pelaku UMKM kuliner. "Kami harap setelah pemulihan dari pandemi Covid-19 ini, ke depan banyak inovasi yang hadir.

Sehingga Taman Pintar akan tetap menjadi satu pilihan wisata bagi masyarakat untuk liburan sambil belajar di Kota Yogya," tandasnya. **(Dhi)-f**

Syawalan Keluarga Besar UWM Yogya Wujudkan Mimpi Bersama dengan Kolaborasi



KR-Juvin tarto

Keluarga besar UWM menggelar Syawalan dengan spirit meningkatkan kolaborasi mewujudkan mimpi bersama.

YOGYA (KR) - Momen syawalan dalam rangkaian Idul Fitri 1444 H tidak sekadar saling memaafkan dan bersalam-salaman, tapi juga sebagai upaya merefresh (menyegarkan) kembali spirit dan semangat akselerasi dalam mewujudkan cita-cita bersama sesuai tupoksi masing-masing.

"Dengan mimpi besar bersama kita semangat mewujudkan Universitas Widya Mataram (UWM) Yogya sebagai kampus besar dan menjadi pilihan di tingkat nasional bahkan internasional," tutur Rektor UWM Prof Dr H Edy Suandi Hamid MEc dalam sambutan saat Syawalan Keluarga Besar Universitas Widya Mataram, Kamis (27/4) di Pendopo Kampus Terpadu UWM Yogya.

Rektor menyebutkan, tahun ini pembangunan tahap II Kampus Terpadu UWM di Banyuraden, Gamping Sleman segera dimulai.

"Dengan 3.200-an mahasiswa saat ini dari 10 prodi telah berkembang menjadi 13 prodi termasuk pascasarjana Hukum," ungkap Eddy yang menjabat Rektor UWM sejak 2017 ini.

Diakui, mewujudkan mimpi pengembangan UWM yang berdiri 7 Oktober 1982 sesuai semangat pendiri Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama KGPH Mangkubumi (sekarang: Sri Sultan Hamengku Buwono X) sebagai pengejawantahan atas upaya pencerdasan kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara tidak mudah. "Mimpi bersama diwujudkan dengan kolaborasi dan jejaring hingga the dream will come true," ucap Prof Eddy tersenyum.

Senada Drs Imam Mujiono MAG dalam hikmah Syawalan bertema Spirit Idul Fitri untuk Harmoni Membangun Kemajuan Institusi menyebutkan UWM sebagai Kampus Berbasis Budaya mempunyai karakter yang kuat dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita besar dengan didukung jejaring yang luas.

"Ada Sri Sultan HB X Ketua Yayasan Mataram Yogyakarta Mahfud MD, Rektor Prof Eddy, dan lainnya yang dikenal luas berperan besar dalam pengembangan UWM," ucapnya.

(Vin)-f

VERIFIKASI DIJADWALKAN HINGGA TINGKAT KAMPUNG 25 Persen Penduduk Ditarget Miliki Digital ID

YOGYA (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya menargetkan hingga akhir tahun ini minimal 25 persen penduduk sudah memiliki identitas kependudukan digital atau Digital ID. Hal itu disesuaikan dengan target yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Dindukcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, mengungkapkan saat ini kepemilikan Digital ID di Kota Yogya sudah mencapai sekitar 3.000 orang dari total 322.877 warga wajib KTP. "Kepemilikan identitas kependudukan digital syaratnya harus punya KTP elektronik dulu agar sudah terekam data dirinya," ungkapnya, Kamis (27/4).

Diakuinya untuk mengejar target 25 persen masih perlu upaya yang cukup panjang. Untuk itu pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait identitas kependudukan digital. Harapannya setelah masyarakat menyadari efektivitas pemanfaatan

Digital ID maka antusiasme untuk melakukan proses verifikasi bisa meningkat. Petugas Dindukcapil Kota Yogya bahkan siap memperluas tempat verifikasi dengan sistem jemput bola.

Menurut Septi, setelah dilakukan sosialisasi banyak masyarakat yang bertanya teknis verifikasi identitas kependudukan digital. Pihaknya juga akan menjadwalkan agenda verifikasi hingga tingkat kampung berdasarkan pengajuan surat permohonan.

"Kampung-kampung, organisasi kemasyarakatan maupun PKK bersurat ke kami untuk permohonan verifikasi identitas kependudukan digital. Saat ini sedang kami jadwalkan," imbuhnya.

Oleh karena itu penjadwalan terjun atau jemput bola ke kampung juga akan disesuaikan dengan permohonan yang telah disampaikan. Sebagian besar permohonan yang diterima Dindukcapil, mayoritas kampung menghendaki proses verifikasi dilakukan pada hari libur

atau akhir pekan. Akan tetapi perlu diinventarisasi terlebih dahulu supaya tidak bersamaan. Sehingga jika pada hari tersebut petugas tidak bisa maka akan diganti hari lain sesuai kesepakatan.

Septi menambahkan, untuk mendapatkan identitas kependudukan digital maka warga harus mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon pintar. Selanjutnya melakukan registrasi dengan memasukkan data nomor induk kependudukan, email dan nomor telepon serta melakukan swafoto untuk verifikasi wajah. Setelah itu memindai QR Code ke petugas Dindukcapil, jika berhasil warga akan mendapat email berisi kode aktivasi yang harus dimasukkan untuk aktivasi. "Proses verifikasi identitas kependudukan digital dilakukan oleh Dindukcapil. Rata-rata warga itu kelupaan passwordnya, makanya kami ingatkan supaya password atau pin itu dicatat atau harus diingat-ingat betul," urainya. **(Dhi)-f**

HAMPIR SATU PEKAN SETELAH IDUL FITRI

42 Perusahaan di DIY Belum Bayar THR

YOGYA (KR) - Meski Idul Fitri 1444 H sudah hampir satu pekan, tapi berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, tercatat masih ada 42 perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

Jumlah tersebut sekitar 10 persen dari 393 perusahaan industri berskala besar dan sedang di DIY berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada 2021. Menyikapi hal itu Disnakertrans DIY mendorong perusahaan untuk segera membayar kewajiban mereka kepada karyawan.

"Kami terus mendorong perusahaan untuk membayar THR karena sampai sekarang masih ada 42 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mereka.



KR-Riyana Ekawati

Aria Nugrahadi

Sebanyak 42 perusahaan tersebut akan mendapatkan teguran karena terlambat membayarkan THR bagi karyawan. Karena sesuai ketentuan Kementerian Tenaga Kerja, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (27/4).

Menurut Aria, Disnaker-

trans DIY sudah melakukan komunikasi dengan 42 perusahaan berkaitan dengan alasan mereka yang belum memenuhi kewajibannya. Selain itu pihaknya juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan mereka benar-benar membayarkan THR tanpa dicitil. Pasalnya, walaupun jumlah perusahaan yang belum membayar THR tahun 2023 menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 75 perusahaan. Penundaan pembayaran THR merupakan pelanggaran aturan. Karenanya bila sampai pekan ini masih ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, sanksi lebih berat bisa saja diberikan.

"Kami terus melakukan komunikasi dan pemantauan terhadap perusahaan supaya mereka bisa membayarkan THR. Walaupun se-

betulnya sudah terlambat, hak para pekerja harus tetap diberikan," ungkapnya.

Sementara itu ketika dimintai tanggapan soal hal itu, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengungkapkan sebenarnya perusahaan dimungkinkan menunda pembayaran THR. Namun alasan mereka harus jelas. Apabila perusahaan yang bersangkutan dinyatakan benar-benar tidak mampu secara finansial pun, mereka dimungkinkan bisa saja mencicil THR. Namun kebijakan itu harus sepengetahuan Disnakertrans DIY.

"Perusahaan dimungkinkan menunda pembayaran THR, tapi kalau kondisi finansial mereka benar-benar sulit dan harus sepengetahuan Disnakertrans DIY. Dalam arti dimungkinkan diizinkan atau tidak," ungkap Sultan. **(Ria)-f**



Anggrismo, SE MEcDev
Kaprod Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

HARI Jumat (24/2) lalu salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor migas (IDX: PGOE) ditawarkan kepada publik dalam bentuk

Ancaman Dibalik Privatisasi

penawaran umum perdana saham (IPO). Pemerintah beralasan, penawaran saham ini penting untuk mendapatkan dana segar demi pengembangan panas bumi di Indonesia. Dinyatakan oleh pemerintah bahwa saham yang dijual hanya 25 persen dari nilai total yang dicatatkan. Dari jumlah tersebut, pemerintah berharap bisa mendapat sekira Rp 9 triliun lebih. Jika merujuk pada UU No 59 Tahun 2009, maka langkah yang diambil oleh pemerintah ini termasuk kebijakan privatisasi. Dalam UU disebutkan bahwa privatisasi adalah suatu bentuk transaksi penjualan saham milik perusahaan BUMN maupun melalui penerbitan obligasi konversi.

Bagi sebagian kalangan, privatisasi dianggap sebagai suatu langkah yang positif karena dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Mereka meyakini bahwa pasar yang

diberikan kebebasan untuk bersaing akan menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga langkah privatisasi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan, serta menciptakan pasar yang lebih efisien dan efektif. Perusahaan dapat dikelola secara lebih profesional dan transparan dengan melepaskan dirinya dari kendali pemerintah. Bagi pemerintah sendiri, privatisasi juga dapat mengurangi biaya karena pemerintah tidak perlu lagi menanggung biaya operasional dan investasi pada perusahaan atau aset negara tersebut. Dana yang diperoleh dari penjualan saham tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti pembangunan infrastruktur atau pendidikan. Sekilas alasan melakukan privatisasi

ini cukup masuk akal. Tapi di balik itu ada bahaya yang menanti. Aset negara milik rakyat tersebut dipastikan sebagiannya sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi milik negara karena sudah dibeli oleh swasta. Dampaknya, negara tidak akan lagi mendapatkan keuntungan yang utuh seperti sebelumnya. Pendapatan negara menjadi berkurang karena ada bagian yang harus diserahkan kepada swasta.

Di sisi lain, tak ada yang bisa menjamin bahwa nantinya perusahaan yang telah diprivatisasi ini tidak akan dikuasai oleh segelintir kelompok swasta pemilik modal. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan, beberapa BUMN jatuh ke tangan swasta. Contoh paling nyata adalah Indosat. Sebelumnya negara sebagai satu-satunya pemilik utama, kini nilai sahamnya tinggal 14 persen. Jadilah kendali perusahaan beserta

keuntungannya akan berpindah ke swasta. Meskipun negara mendapat dana segar, kendali dan kontrol terhadap perusahaan pasti akan berbeda dengan sebelumnya karena adanya pemegang saham swasta ini. Selain itu masih ada bahaya besar yang jarang diungkapkan. Hal yang cukup menonjol adalah berpindahnya aset milik rakyat kepada segelintir orang atau pengusaha, baik pengusaha lokal maupun asing. Dampak lebih jauh adalah pengurangan kesempatan kerja. Privatisasi sangat mungkin mengakibatkan pemangkas biaya termasuk pengurangan tenaga kerja. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran di daerah-daerah yang bergantung pada perusahaan sebagai sumber penghidupan mereka. Selain itu, akan sangat mungkin terjadi perubahan kebijakan dalam perusahaan dengan



mempertimbangkan para investornya. Sudah menjadi rahasia umum jika para pemilik saham cenderung memprioritaskan keuntungan mereka sendiri di atas tanggung jawab sosial perusahaan.

Lebih dari itu, dengan langkah privatisasi ini akan menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan. Dengan demikian, akan ada banyak orang yang tidak dapat memanfaatkan harta tersebut. Pada gilirannya distribusi kekayaan di sebuah negara akan semakin timpang. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan, sesuai firman Allah SWT : "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS Al Hasyr: 7) Wallahual'lam. ***